

PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS

Nafi' Inayati Zahro

Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus

nafi_umk@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling dengan tipe judgement sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) pada bagian keuangan pada SKPD Kabupaten Kudus. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi Analisis Berganda. Variabel dependen untuk penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah, sedangkan variabel independennya adalah Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Intern. Hasil penelitian membuktikan bahwa baik Sistem Informasi Akuntansi maupun Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: sistem, informasi, pengendalian intern, kinerja, pemerintah daerah

ABSTRACT

This research aim to estimate empirically the influence of accounting information system and internal control toward the local government performances. The samples were selected by using a purposive sampling method, in particular judgement sampling type, involving all the staff of government employees on the financial section around the work units of Kudus local government. The data was collected using a questionnaire distributed to respondents. Technical analysis of the data used is a multiple regression analysis. The Dependent variable for the research is the local government performance, while independent variable is accounting information system and internal control. The Result of this research indicated that accounting information system and internal control system have significant influence which the local government performances.

Key words: system, information, internal control, performance, local government

1. PENDAHULUAN

Peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Karena perkembangan teknologi sudah semakin pesat sehingga kebutuhan manusia akan teknologi juga semakin banyak. Penggunaan IT dalam sebuah organisasi sangatlah penting, untuk menerapkan IT haruslah dilihat karakteristik organisasi tersebut. Apakah dengan IT mampu meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan, sehingga dalam penerapan IT dibutuhkan orang yang handal yang dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya teknologi dapat memberikan berbagai kemudahan bagi manusia untuk menjalankan segala aktivitas. TI dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi negara secara menyeluruh. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara/daerah (Rohman, 2007).

Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Almanda:2012). Kinerja pemerintah salah satunya dipengaruhi oleh kinerja aparatur perangkat daerah. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas (Cokroaminoto, 2007). Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil kerja yang dicapai pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman, serta ketrampilan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, Astuti (2008).

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, maka keberadaan lembaga-lembaga tersebut semakin diperlukan, namun apakah dengan jumlah lembaga-lembaga pengawasan yang cukup banyak dan pelaksanaan pengawasan yang belapis-lapis dapat memperoleh hasil yang efektif, oleh karena inilah semakin banyaknya waktu yang harus disediakan hanya untuk melayani aparat pengawasan. Hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya untuk kepentingan yang lebih luas, apakah dengan melakukan penyederhanaan terhadap lembaga-lembaga pengawasan yang ada ataukah membuat suatu aturan yang jelas dan tegas dengan tetap berpegang teguh pada upaya-upaya peningkatan kinerja pemerintah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. *Agency Theory*

Masalah keagenan muncul apabila pihak-pihak yang saling berkepentingan bekerjasama dan memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Hubungan agensi muncul ketika seorang pemerintah daerah atau lebih sebagai prinsipal (*stockholder*), menugaskan kepada pihak yang lain sebagai agen (*manager*) dengan mendelegasikan tanggungjawab kepadanya.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), biaya keagenan meliputi pengeluaran *monitoring*, pengeluaran *bonding* dan *residual loss*. Pengeluaran *monitoring* adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi kegiatan dan perilaku agen (manajer). Pengeluaran *bonding* adalah pengeluaran yang dikeluarkan manajer untuk memberi jaminan kepada pemilik (*shareholder*) bahwa manajer tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, terkait dengan pengendalian terhadap agen. Pada kondisi tertentu prinsipal dapat mengeluarkan biaya untuk mempengaruhi manajer agar manajer memaksimalkan kemakmuran prinsipal atau dikenal dengan *residual loss*.

Mengacu pada teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, Faristina (2011).

2.2. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis, Krismiaji (2010:4). Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi, dalam Bodnar dan Hopwood (2006:24). Informasi yang dihasilkan melalui sistem informasi akuntansi kemudian dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam suatu organisasi.

Sistem Informasi Pengelolaan SKPD merupakan sistem informasi akuntansi bagi pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.3. Pengawasan Intern

Menurut AICPA dalam *Statement On Auditing Standard* No. 1 (AICPA, seperti dikutip oleh Basalamah (2008:135), definisi pengendalian intern sebagai berikut: "Pengendalian Intern terdiri dari rencana organisasi serta seluruh metode koordinasi dan pengukuran yang diterapkan oleh perusahaan untuk menjaga aktivitya, menguji

keakuratan dan keandalan data akuntansinya, mendukung efisiensi operasionalnya, serta mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan manajerial yang telah ditetapkan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

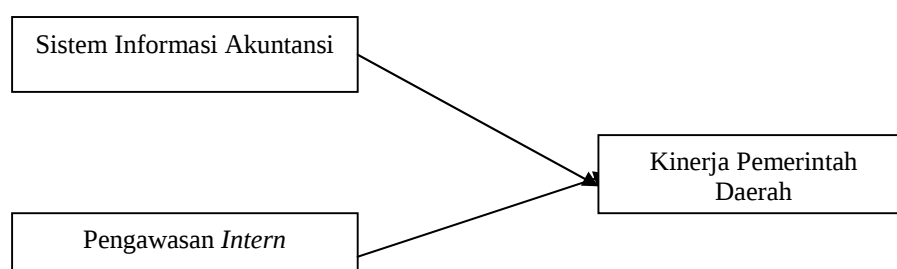
2.4. Kinerja Pemerintah daerah

Kinerja pemerintah daerah merupakan hasil kerja pemerintah daerah tersebut dengan mengkombinasikan kemampuan, usaha dan kesempatan dalam melaksanakan tugasnya. Individu yang memiliki kinerja yang tinggi akan selalu berorientasi pada prestasi, memiliki percaya diri, berpengendalian diri, dan memiliki kompetensi.

Penilaian kinerja bermanfaat bagi organisasi untuk mengukur keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan karena pengukuran kinerja organisasi secara tidak langsung ditunjukkan oleh tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah (wuryaningrum, 2007).

2.5. Kerangka Konsep Penelitian dan Hipotesis

Kerangka konsep penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



H1: Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

H2: Pengawasan *intern* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

3. METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer bersumber dari jawaban responden atas beberapa jumlah pertanyaan. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada SKPD di lingkungan pemerintah kota Kudus. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan tipe *judgement sampling*. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Persamaan regresi untuk penelitian ini adalah:

$$KPD = \alpha + \beta_1 SIA + \beta_2 PI + e$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Berganda. Model ini terdiri dari dua variabel independen yaitu sistem informasi akuntansi dan pengawasan intern, sedangkan variabel dependennya adalah kinerja pemerintah daerah.

Tabel 1. Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
C	8,789	4,515		1,215	.176
SIA	.251	.156	.240	1,504	.015
PI	.475	.244	.328	1,835	.047
R squared (R^2)=0.451					
F Hitung=11.562					
$\alpha = 5\%$					

Sumber Data Primer Diolah Tahun 2016

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa angka R^2 sebesar 0,451. Nilai *R square* 45,1% mengandung maksud bahwa variabel kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel SIA dan PI. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 54,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini. Interpretasi model regresi dapat dirumuskan suatu persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 8,789 + 0,251X_1 + 0,475X_2 + 4,515$$

Berdasarkan uji t pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi SIA sebesar $0,015 < 0,05$. Dengan demikian penelitian ini berhasil membuktikan hipotesis alternative pertama (H1). Yang menunjukkan bahwa dengan adanya SIA akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Setiap organisasi dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem informasi akuntansi dalam melaksanakan rutinitas tugas pemerintah agar mempermudah, mempercepat, dan meminimalisir tingkat ketidak akuratan data.

Dari tabel diatas juga terlihat Berdasarkan informasi diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi SPI adalah 0,475, sedangkan nilai signifikansinya adalah $0,047 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa PI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian intern yang diterapkan di lingkungan pemerintah daerah maka kinerja pemerintah daerah pun akan semakin meningkat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan simpulan diatas maka saran dari penelitian ini adalah: banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah namun belum digunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk memasukkan faktor-faktor tersebut untuk diteliti, seperti misalnya motivasi, tingkat kepercayaan pemakai, tingkat motivasi, maupun faktor-faktor yang lainnya yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanda, Primadona. 2012. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.
- Astuti. 2008. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu (Penelitian Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Basalamah. Aries S.M. 2008. *Auditing PDE Dengan Standar IAI*. Depok Timur. Penerbit Usaha Kami.
- Bordnar, Hoopwod. 2005. "Accounting Information System", New Jersey: Prentice Hall
- Cokroaminoto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Individu*. www.cokroaminoto.wordpress.com
- Jansen, M, dan W. Meckling, (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency, and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*: 305-360.
- Faristiana, Rosalin. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan layanan Umum, Studi Pada BLU di Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro: semarang.
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta. Hal 4-5.

Rohman, Abdul. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*.

Wuryaningrum, Ambar. 2007. *Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu dengan Kepercayaan dan Kompleksitas Sistem Sebagai Moderating Variabel*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.